

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan Internasional yang menyangkut dengan pokok bahasan berkenaan dengan segala macam bentuk perilaku individu yang bersifat lintas nasional dan berbagai kecenderungan global yang berdampak terhadap kemanusiaan, dan mempelajari juga aspek – aspek dalam sistem global, atau aturan – aturan yang dimana para aktor mengstrukturkan dan menata interaksi – interaksi mereka dalam sistem yang global. Hubungan Internasional tidak hanya berfokus kepada bagaimana aktor – aktor negara tersebut berinteraksi dengan “Kekuatan” atau “*Power*”, akan tetapi berkenaan juga dengan bagaimana interaksi dengan aktor – aktor non-negara yang juga memiliki kekuatan atau kekuasaan nya sendiri.

Hubungan Internasional yang awalnya hanya berfokus pada kajian tentang Diplomasi, Keamanan Internasional yang masih berfokus kepada keamanan tradisional, Hukum Internasional, Konflik – konflik regional, kepentingan nasional Namun dengan adanya Globalisasi membuat dunia dengan cepat berubah dan isu dalam kajian Hubungan Internasional telah bergeser fokus bukan hanya berfokus kepada isu tradisional saja namun pada saat ini merujuk pada isu – isu baru seperti Keamanan Manusia, Lingkungan Hidup, Masalah Gender, Global Governance, masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit – penyakit menular. (Bakry, 2017:8-9)

Hubungan Internasional pada era Globalisasi ini juga tidak lagi hanya memfokuskan Negara sebagai Aktor Utama yang Dominan, akan tetapi juga Organisasi Internasional, Organisasi Internasional tidak hanya sebagai pelengkap, Namun, telah menjadi Aktor yang memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi di berbagai negara dunia. Maka sejak saat itu mulai muncul berbagai Organisasi Internasional dan Rezim – Rezim yang mulai fokus terhadap isu – isu baru dalam kajian Hubungan Internasional.

Salah satu nya adalah *Perserikatan Bangsa Bangsa* sebagai salah satu Organisasi Internasional terbesar di dunia. PBB juga membentuk badan untuk menanggulangi Permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan negara, keamanan manusia, memperbaiki lingkungan hidup. Dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi dunia dan juga negara anggota. UNDP telah di dedikasikan untuk agenda reformasi PBB, UNDP telah bekerja sama pada sekitar 170 negara, yang tujuan khusus nya untuk membantu dan mencapai penghapusan kemiskinan, dan menghapuskan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terjadi di setiap negara di dunia. UNDP membantu negara-negara di dunia untuk bisa mengembangkan kebijakan, keterampilan kepemimpinan, kemahiran dalam bermitra, kemampuan institusional dan membangun ketahanan untuk mempertahankan hasil pembangunan negara.

(<https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html> di akses pada 10 April 2020)

UNDP telah dibentuk sejak tahun 1966, yang merupakan jaringan pembangunan global PBB. UNDP memiliki Tujuan utama yaitu sebagai pemberi bantuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Bantuan tersebut meliputi tenaga ahli yang sudah ahli dalam bidangnya, penasihat ahli, pelatihan khusus, dan instrumen pembangunan bagi negara.

UNDP juga memiliki fungsi yang umum yaitu : mewujudkan demokrasi di setiap negara, menanggulangi angka kemiskinan di setiap negara, membantu setiap negara untuk bangkit dari keterpurukan, perluasan Energi dan keseimbangan Lingkungan Hidup, menanggulangi penyakit HIV/AIDS di setiap negara (<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-156.pdf> di akses pada 10 April 2020)

UNDP bekerjasama dengan semua badan – badan PBB, dengan membuat suatu program yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati pada tahun 2000 dan telah berakhir pada tahun 2015. *Millenium Development Goals* (MDGs) tersebut berisikan 8 tujuan, 21 sasaran dan 61 indikator. 8 sasaran tersebut yaitu Memberantas kemiskinan dan kelaparan Ekstrim, Mewujudkan Pendidikan dasar untuk semua, Mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan Perempuan, Menurunkan angka kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Memerangi HIV dan AIDS, Malaria serta penyakit lainnya, Memastikan kelestarian lingkungan, Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Namun, sasaran tersebut hanya bertujuan untuk mengurangi sebagian dari setiap masalah pembangunan. Setelah berakhirnya MDGs, MDGs digantikan dengan SDGs, yang telah di

sepakati oleh 193 negara pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa ke 70 yang terjadi pada bulan September 2015. Di New York, Amerika Serikat.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan baru tersebut di tuangkan pada dokumen yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” yang berisikan 17 tujuan, 169 sasaran dan di berlakukan pada tahun 2016 hingga 2030. Dan istilah tersebut dikenal dengan *Sustainable Development Goals*. 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* yaitu Tanpa kemiskinan, Tanpa kelaparan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kualitas Pendidikan yang baik, Kesetaraan Gender, Air bersih dan Sanitasi, Akses ke energi yang terjangkau, Pekerjaan layak dan pertumbuhan Ekonomi Infrastruktur, Industri dan Inovasi Mengurangi ketimpangan, Kota dan Komunitas yang berkelanjutan, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Menjaga Ekosistem Laut, Menjaga ekosistem darat, Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang kuat, Kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan – tujuan SDGs tersebut mengakomodasi permasalahan tentang pembangunan secara lebih komprehensif, SDGs yang bersifat universal berperan seimbang bagi seluruh negara, yaitu bagi negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk memiliki peran penuh terhadap pembangunan negara, negara telah memiliki peran dan tanggung jawab sama untuk mencapai SDGs. (Panuluh, Fitri, 2016:4)

Program SDGs membawa prinsip mendasar yang menjadi penyeimbang dimensi Ekonomi, Sosial, Budaya serta Lingkungan yaitu : Manusia, Bumi, Kemakmuran, Perdamaian dan Kemitraan. Baik kepala negara dan pemerintah telah sepakat untuk menyepakati program *Sustainable Development Goals* dengan

komitmen bersama untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan dan mengurangi kesenjangan. (Panuluh,Fitri,2016:5)

Tujuan SDGs tersebut menjadi penting bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara dikarenakan tujuan tersebut akan dapat menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan di beberapa sektor seperti ekonomi, Pendidikan dan kesehatan. Tujuan SDGs terdapat poin penting untuk pembangunan setiap negara. Negara – negara yang menjadi anggota PBB wajib untuk mencapai setiap capaian yang terdapat poin – poin di SDGs. (Putri, 2019:42)

Kemiskinan masih menjadi Persoalan yang sulit di tuntaskan terkhususnya pada negara – negara yang berkembang dan kurang berkembang. Kemiskinan termasuk kedalam persoalan yang bersifat kemanusiaan. Adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang lain yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah juga termasuk kepada pelanggaran terhadap Hak-Hak Asasi Manusia. Di karenakan terancam nya keamanan manusia di karenakan kemiskinan yang bisa mengancam kehidupan manusia. Tidak bisa mendapatkan makanan yang layak, tidak bisa mendapatkan Pendidikan dan kesehatan yang layak termasuk kedalam ancaman keamanan manusia. (Ishartono & Raharjo, 2015:162)

Indonesia menjadi salah satu dari 193 negara yang menyepakati agenda SDGs tersebut, maka dari itu Indonesia belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya Indonesia mengalami keterlambatan sepuluh tahun pengimplementasiannya dari saat pengesahannya pada tahun 2000, Keterlambatan tersebut di karena

Indonesia masih dalam pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 1998, maka pada saat ini Indonesia berusaha untuk tidak mengalami ketertinggalan pengimplementasian SDGs. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya untuk tepat waktu pada pelaksanaan SDGs dengan mendatangkan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk penandatanganan SDGs pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. Untuk mencapai keberhasilan SDGs pada tahun 2030, masih banyak hal yang harus dilakukan. Dengan mengutamakan SDGs sebagai agenda utama pembangunan Nasional. Membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pelaksanaan SDGs yang harus dilakukan dengan semangat transformasi dan tidak ada yang tertinggal di belakang. Stakeholder – stakeholder yang lain nya juga ikut berpartisipasi sangat aktif untuk membantu pemerintah dalam membuka ruang yang telah di sediakan dalam program SDGs Global. (Panuluh,Fitri,2016:12)

Upaya keseriusan Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals, tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs, telah di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo, Perpres tersebut berisikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya di singkat dengan TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan serta sasaran global tahun 2016 – 2030.

Peta jalan nasional TPB yang merupakan dokumen rencana yang berisi kebijakan strategis tahap-tahap dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB yang merupakan dokumen yang berisi

program dan kegiatan rencana kerja 5 tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional. Rencana Aksi Daerah TPB yang merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

(<https://www.sdg2030indonesia.org/page/5-perpres> di akses pada 10 April 2020)

Di luar muatan strategi dan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam tercapainya SDGs, Perpres juga mengatur peran setiap Kementrian dan Lembaga – Lembaga dalam pelaksanaan SDGs dan mengatur juga peran setiap stakeholder non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs. seperti Kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi dan pelaku usaha. Penyusunan indikator SDGs tingkat nasional, dilakukan dengan koordinasi terpusat, yang dilakukan oleh Bappenas dan juga BPS yang bertugas sebagai penyedia data nasional. (Panuluh,Fitri,2016:13)

Dengan adanya Perpres tahun 2017 tentang SDGs yang disesuaikan dengan Agenda SDGs, maka pada Tujuan poin pertama adalah Tanpa kemiskinan, dengan upaya untuk mengakhiri semua bentuk kemiskinan pada seluruh dimensi kehidupan manusia. Tujuan pencapaiannya adalah sebagai berikut : Pengentasan kemiskinan bagi semua orang yang pada saat ini mempunyai pendapatan kurang dari 18,335 rupiah perharinya, Perbandingan antara laki – laki dan perempuan di kurangi pada semua usia yang hidup didalam kemiskinan, Perlindungan yang sesuai untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, Menjamin semua

masyarakat miskin untuk mendapatkan sumber daya ekonomi, dan pelayanan dasar terhadap suatu kepemilikan, Pembangunan untuk ketahanan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan mengurangi kerentanan terkait iklim, guncangan ekonomi dan sebagainya, Pengarahan yang dilakukan secara serentak untuk pembangunan sumber daya yang berasal dari berbagai macam sumber dilakukan dengan berbagai Kerjasama pembangunan untuk perubahan yang lebih baik dengan menyediakan sarana yang memadai dan juga terjangkau bagi negara berkembang dan kurang berkembang dalam melakukan suatu program untuk kebijakan pengentasan kemiskinan di segala dimensi kehidupan, Membuat suatu kerangka kebijakan yang tangguh pada tingkat nasional, regional dan internasional, yang didasari atas rencana pembangunan yang berpihak kepada kelompok yang tidak mampu, yang dapat mendukung terjaminnya investasi yang cepat dalam tindakan pengentasan kemiskinan. (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, 2017:1)

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sulit untuk di tuntaskan ada sekitar 28 juta orang yang telah hidup dalam kemiskinan (sekitar sebelas persen dari populasi) dan diperkirakan empat puluh persen dari populasi manusia, yang rentan jatuh dalam kemiskinan. Dengan itu program SDGs di harapkan akan mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia.

(<https://www.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-Zakat-Indonesian.pdf> di akses pada 04 April 2020)

Di Indonesia, Pemerintah telah melakukan program yang telah di implementasikan dari tujuan SDGs pada poin ke satu dalam bidang sosial yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan yaitu program Zakat yang di harapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan melalui redistribusi kekayaan yang berdasarkan dengan keuangan islam. Program tersebut telah disepakati antara Badan Amil Zakat Nasional dan UNDP Indonesia pada tahun 2017. Zakat tersebut diharapkan dapat memajukan program SDGs, dikarenakan zakat dan SDGs memiliki kesamaan yaitu mengurangi kemiskinan. Program Zakat ini di telah di usung di Indonesia dan beberapa kota di Indonesia telah di implementasikan program zakat untuk pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

(<https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/articles/2017/08/1/23/islamic-finance-offers-enormous-opportunity-to-support-sdgs-and-address-inequality.html> di akses pada 08 Mei 2020)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan Badan resmi dan merupakan badan satu-satunya yang di dirikan oleh pemerintah yang berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2001, dengan tugas untuk menggabungkan dan mendistribusikan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh di tingkat nasional. Melahirkan undang – undang No.23 pada tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan terhadap zakat, undang – undang tersebut mengkokohkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan untuk pengelolaan terhadap zakat yang dilakukan pada tingkat nasional.

Dengan visi dan misi yang bertujuan untuk : Pengkoodirnasian antara BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, serta LAZ untuk pencapaian target – target pada tingkat nasional, Memaksimalkan dengan terukur dalam pengumpulan zakat di tingkat nasional, Memaksimalkan penyaluran dan penggunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengendalian kesenjangan sosial, Mempraktikan sistem manajemen finansial yang bersifat transparan dan tanggungjawab yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, Mempraktikan sistem sarana yang terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan terhadap zakat nasional, Penggerakan terhadap dakwah islam sebagai salah satu cara untuk membangkitkan zakat secara nasional dengan cara sinergi ummat, Berperan aktif dan sebagai pemimpin untuk zakat global, Memprioritaskan Zakat sebagai alat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur, Melebarkan kemampuan amil zakat yang memiliki keunggulan dan menjadi penunjuk dunia. Baznas memiliki 8 kategori sebagai penerima Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

(<https://baznas.go.id/profil> di akses pada 13 September 2020)

UNDP dan BAZNAS Pada tahun 2017, UNDP dan BAZNAS resmi menjadi mitra dalam untuk pengembangan program *Sustainable Development Goals* di Indonesia, dengan program Zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, BAZNAS pun memperkenalkan “Inklusif Zakat” yang menjadi solusi dalam masalah ekonomi dan sosial secara global. Zakat bisa menjadi salah satu dana untuk

Sustainable Development Goals sehingga pendanaan SDGs tidak bergantung kepada donor.

(<https://kanalindonesia.com/41628/2018/04/25/baznas-paparkan-manfaat-zakat-di-markas-pbb/> di Akses pada 13 september 2020)

Penerima Zakat (asnaf) yang relevan dengan SDGs adalah Fakir, Miskin serta Fi Sabilillah. Zakat selain di berikan kepada penerimanya, digunakan juga sebagai dana untuk pembangunan berkelanjutan. Selain pendanaan yang berasal dari Zakat, Sukuk juga menjadi salah satu alat untuk menarik pendanaan yang relevan dan sesuai dengan syariat islam menjadi salah satu alat untuk menarik pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan Syariat islam, dengan tujuan pendanaan tersebut untuk pendanaan umum atau pendanaan pada proyek pembangunan bendungan, pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya. (BAZNAS & UNDP, 2018:14)

Zakat dan SDGs memiliki persamaan, tujuan SDGs yang utamanya adalah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan serta juga mengurangi kesenjangan dengan kegiatan pembagian kekayaan. Tujuan-tujuan tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Sehingga Zakat dan SDGs memiliki persamaan yang tujuan paling utamanya pengentasan kemiskinan di Indonesia. (<https://www.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-Zakat-Indonesian.pdf> di akses pada 04 Juni 2020)

Zakat memiliki potensi besar untuk kontribusi sebesar \$ 23 Miliar per-tahun atau 3,4 % dari PDB, Kontribusi tersebut pada saat ini disalurkan kepada BAZNAZ, sehingga baru 1% dari potensi tersebut. Kesepakatan antara UNDP dan

BAZNAZ menandakan bahwa sebuah Badan Zakat mempunyai komitmen untuk mendukung program SDGs. Pendanaan yang inovatif menjadi suatu penawaran peluang untuk penyaluran keuangan islam dalam mendukung SDGs. UNDP dan BAZNAS dapat berkolaborasi dengan Langkah – Langkah seperti : Menciptakan suatu pengalaman untuk pengembangan, Penataran dan jaringan yang di perkenalkan oleh badan Zakat termasuk dengan prinsip – prinsip islam yang berkenaan dengan keuangan islam dan kebersamaan sosial, Dukungan dari ulama dan kelompok-kelompok islam yang ikut terlibat dalam penelitian, Peningkatan tentang kesadaran terhadap SDGs serta relevansinya dengan keuangan islam, Bekerjasama untuk memahami instrumen dalam pendanaan inovatif, sebagai cara untuk menyalurkan keuangan islam untuk SDGs.

(<https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/08/23/islamic-finance-offers-enormous-opportunity-to-support-sdgs-and-address-inequality.html> di akses pada 13 september 2020)

Program – Program UNDP dan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia di tahun 2017, Pembangunan Tenaga Listrik Mikrohidro untuk desa – desa yang berada di jambi, di tahun 2018, UNDP dan BAZNAS membantu kota palu dalam memberikan dana, kota mengalami kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi serta tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kerusakan tersebut berupaya infrastruktur yaitu Sekolah, Aktivitas ekonomi dari sektor industri.

(<https://www.kabarno.com/undp-dan-idb-bantu-korban-gempa-palu/> di Akses pada 13 September 2020)

Di tahun 2019, UNDP dan BAZNAS berupaya untuk mendorong pembangunan perekonomian, pada sebuah desa yang berada di Lombok. Karena pada bulan Agustus 2018, Lombok dilanda gempa yang memiliki kekuatan 7,0 skala Richter. tempat produksi bagi produsen kopi dan kacang mete mejadi tempat terparah, di Lombok utara. Program ini merupakan program selanjutnya setelah adanya pembangunan pembangkit listrik mikrohidro.

(<https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2019/UNDP-dan-Baznas-akan-membangun-kembali.html> di akses pada 26 Agustus 2020)

Untuk menunjukkan bahwa karya tulis ini memiliki keaslian, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan yang berguna untuk memperbanyak teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian, Dari penelitian terdahulu yang terpilih tidak ada yang memiliki judul yang sama dengan penelitian peneliti. Dengan penelitian terdahulu peneliti mengambil beberapa penelitian yang berguna sebagai referensi untuk memperbanyak bahan kajian dalam penelitian.

Penelitian terdahulu mengenai *Sustainable Development Goals* pernah dilakukan oleh Ishartono & Santoso Tri Raharjo, berjudul “*Sustainable Development Goals (SDGs) & Pengentasan Kemiskinan*” yang diterbitkan pada jurnal *Share Social Work Journal* tahun 2016. Penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana Program SDGs di pada poin pertama yaitu tanpa kemiskinan, yang dimana tujuan tersebut menjadi solusi dalam mengakhiri kemiskinan yang terjadi di Indonesia, karena kemiskinan di Indonesia menjadi persoalan yang berat serta

menjelaskan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. (<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13198> di akses pada 26 April 2020)

Penelitian terdahulu kedua yaitu Roy Eka Pribadi , berjudul “*Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua*” Jurnal yang diterbitkan pada eJournal Ilmu Hubungan Internasional Unmul tahun 2017. Jurnal tersebut berfokus kepada program *Sustainable Development Goals* pada poin ke empat yaitu Pendidikan Berkualitas yang di implementasikan terhadap Pendidikan di Papua dengan program satu atap (SATAP), program sarjana Mendidik di daerah terdepan terluar tertinggal (SM3T), program baca, tulis, hitung (Calistung).

(<https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2329> di akses pada 26 April 2020)

Penelitian terdahulu ketiga yaitu Neli Erwandari dari Universitas Mulawarman “*Implementasi Sustainable Development Goals (SDG’s) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau*”. yang diterbitkan pada jurnal eJournal Ilmu Hubungan Internasional Unmul tahun 2017. Jurnal tersebut berfokus terhadap bagaimana Implementasi Sustainable Development Goals pada poin ke dua yaitu Tidak ada Kelaparan di Provinsi Riau, dan apa saja upaya – upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan yang menjadi solusi dalam tujuan Tidak ada kelaparan pada provinsi tersebut. ([https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/Jurnal-HI%20FIX%20\(08-09-17-06-12-07\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/Jurnal-HI%20FIX%20(08-09-17-06-12-07).pdf) di akses pada 26 April 2020)

Penelitian terdahulu ke empat yaitu Claudia Karina Putri, Alumni dari Universitas komputer Indonesia yang berjudul “*Peran Aiesec Local Committee*

(LC) Bandung Dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)” yang diterbitkan pada *Global Political Studies Journal* tahun 2019. Penelitian tersebut berfokus pada peran Organisasi non pemerintah yaitu AIESEC. Yang mendukung keberhasilan Sustainable Development Goals di Indonesia khususnya di kota bandung. dan banyak kegiatan – kegiatan AIESEC bertujuan untuk mencapai Sustainable Development Goals di Bandung yaitu seperti proyek Sampurasun, I Green, Social Entrepreneur, Impacting, Malala dan I Care for Disabled. (<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2008> di Akses pada 26 April 2020)

Penelitian terdahulu kelima yaitu Achmad Ismail yang berjudul “*NGO dalam Diplomasi Ekonomi: Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG’s) Poin Pengentasan Ketimpangan Sosial di Indonesia*”. yang diterbitkan pada jurnal *Insignia Journal of International Relations* tahun 2019. Penelitian tersebut berfokus kepada peran NGO yaitu INFID sebagai salah satu aktor yang memiliki peran penting dalam diplomasi ekonomi transnasional Indonesia, yang berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dan pada pertemuan PBB terkait implementasi SDGs dalam poin pengentasan ketimpangan sosial. (<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/1255> di akses pada 26 April 2020)

Perbedaan penelitian yang di teliti oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus kepada peran UNDP sebagai dari salah satu badan Organisasi Internasional Pemerintah yaitu PBB dalam mewujudkan program –

program yang berkaitan dengan SDGs berfokus pada poin pertama dari Tujuh Belas poin tujuan yaitu tanpa kemiskinan. Serta berfokus kepada peran pemerintah Indonesia dalam keseriusan mereka untuk mewujudkan pencapaian SDGs poin pertama yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan melalui program zakat.

Melihat pentingnya peran UNDP yang memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi negara – negara berkembang dan negara – negara kurang berkembang. serta berdasarkan paparan masalah diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Peran United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016-2019)”

Peneliti memiliki ketertarikan dalam meneliti isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional

Dengan adanya mata kuliah Organisasi Internasional membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana peran suatu Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional. Serta bagaimana kebijakan Organisasi Internasional dalam menyelesaikan persoalan yang di hadapi oleh negara – negara di dunia yang berkaitan dengan pembangunan.

2. Studi Keamanan Internasional

Dengan adanya mata kuliah Sistem Keamanan Internasional membantu peneliti mengetahui tentang keamanan manusia yang di dalam terdapat keamanan ekonomi terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menjamin kesehatan dan terbebas dari ancaman kemiskinan. Merupakan salah satu isu keamanan non tradisional

3. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang

Dengan adanya Mata Kuliah tersebut membantu peneliti mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat negara – negara berkembang dan negara – negara kurang berkembang untuk bisa maju, salah satu nya adalah pembangunan yang selalu di fokuskan pada negara utara namun negara selatan tidak di fokuskan sehingga hal tersebut membuat negara selatan tertinggal.

4. Environmental Issues

Dengan adanya mata kuliah Environmental Issues membantu peneliti mengetahui tentang isu – isu lingkungan yang di angkat dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, yang menjelaskan juga bagaimana pembangunan berkelanjutan hadir dari pandangan para developmentalis bahwa Pembangunan bisa terus dilakukan dengan adanya keseimbangan antara keperluan manusia yang semakin tinggi namun tetap beradaptasi pada lingkungan hidup.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Mayor

"Bagaimana upaya UNDP dalam membantu mewujudkan program *Sustainable Development Goal* bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia?"

1.2.2. Rumusan Minor

1. Apa saja program yang telah dilakukan UNDP untuk mendukung keberhasilan SDGs di bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia?
2. Sejauhmana keberhasilan pencapaian SDGs di Indonesia dalam bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia?
3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi UNDP dalam melaksanakan program - program SDGs di Bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia?

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat penelitian ini memiliki cakupan yang luas maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah yang berkaitan dengan **Sustainable Development Goals** yang merupakan program dari *United Nations Development Programme* yang merupakan badan dari Organisasi Perserikatan Bangsa - Bangsa namun penelitian ini akan berfokus pada bidang social pada poin pertama dari tujuh belas poin tujuan SDGs yaitu tanpa kemiskinan Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 2016 – 2019.

Penelitian di mulai dari tahun 2016 di karenakan program SDGs mulai di implementasi kan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sebagai pengganti

dari MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015. Pada tahun 2017 Program PBB telah diintegrasikan di Indonesia mengingat bahwa telah diluncurkan nya perpres yang mengatur kebijakan tentang SDGs yang harus melibatkan setiap Stakeholder untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

Dan pada tahun 2017 Program Zakat mulai disepakati oleh BAZNAS DAN UNDP. Tahun 2017 – 2019 Rencana Aksi Nasional mengenai SDGs yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDGs. Maka penelitian ini dibatasi hingga tahun 2019 agar peneliti dapat mengetahui perbedaan hasil dari keberhasilan dan kegagalan dari program SDGs terdapat pada poin pertama yaitu tanpa kemiskinan yang telah tercantum pada Program UNDP, Rencana Aksi Nasional dan RPJMN. Ruang lingkup penelitian ini adalah kegiatan UNDP Indonesia dan BAZNAS yang berhubungan dengan SDGs dalam bidang sosial untuk mengentaskan kemiskinan yaitu Program Zakat yang berada Indonesia namun pada penelitian tidak dispesifikasikan pada satu lokasi khusus, akan tetapi beberapa kota - kota yang berada di Indonesia meliputi Jambi, Lombok dan Palu.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran UNDP di Indonesia dan juga untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam mewujudkan kesuksesan *Sustainable Development Goals* pada bidang sosial yang terdapat pada poin ke satu dari tujuh belas poin yang terdapat dalam program SDGs yang telah diintegrasikan oleh kedua pihak.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui program-program yang telah dilakukan UNDP untuk mendukung keberhasilan SDGs di bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi UNDP dalam melaksanakan program - program SDGs di Bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia
3. Untuk menganalisa keberhasilan UNDP untuk pencapaian SDGs di Indonesia dalam bidang pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan Karya Ilmiah ini secara Teoritis adalah digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi peneliti maupun pembaca mengenai peran Organisasi Internasional, Konsep *Sustainable Development Goals*, Karya ilmiah tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam kajian studi Organisasi Internasional, Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang, Environmental Issue, Studi keamanan internasional. Karya Ilmiah ini juga di harapkan bisa menambah wawasan mengenai Hubungan Internasional, Organisasi Internasional dan Peran Organisasi Internasional yang memiliki dampak terhadap suatu negara.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan Karya Ilmiah ini secara praktis adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Hubungan Internasional yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan masyarakat umum. Karya Ilmiah ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran Organisasi Internasional dalam suatu negara serta bagaimana peran negara yang ikut serta dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Negaranya, Bagi Peneliti di harapkan bisa mengasah daya fikir, Analisa fenomena, dan wawasan sebagai penstudi Hubungan Internasional.